



HISTORIA VITAE

SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH

Volume 21, No.2, Oktober 2007

ISSN - 0215-8809

REKONSTRUKSI MASA LAMPAU INDONESIA
H.Purwanto

MAKNA LAMBANG DAN SIMBOL KENTONGAN DALAM
MASYARAKAT INDONESIA
E.Sumiyati

KESULTANAN MOGHUL DI INDIA
B. Musidi

MASA KOLONIAL BELANDA 1800-1825
A. Kardiyat Wiharyanto

PROFIL: INDIA

2-2

Diterbitkan oleh :

Program Studi Pendidikan Sejarah - FKIP, Jurusan Ilmu Sejarah - Fakultas Sastra

Universitas Sanata Dharma

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

HISTORIA VITAE

SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Editorial	iii
Rekonstruksi Masa Lampau Indonesia	93 - 120
H. Purwanta	
Makna Lambang dan Simbol Kentongan dalam Masyarakat	
Indonesia	121 - 134
F. Sumiyati	
Kesultanan Moghul di India	135 - 156
B. Musidi	
Masa Kolonial Belanda 1800-1825	157 - 169
A. Kardiyat Wiharyanto	
Profil: India.....	170 - 186

REKONSTRUKSI MASA LAMPAU INDONESIA

H. Purwanta

I. Pendahuluan

Dilihat dari sisi umurnya sebagai bangsa merdeka, Indonesia dapat dikategorikan sebagai sebuah bangsa yang relatif masih muda. Seperti orang muda pada umumnya, berbagai impian memenuhi pemikiran bangsa Indonesia. Salah satunya adalah keinginan untuk segera mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakannya. Akan tetapi, tampaknya cita-cita itu masih terlalu tinggi untuk dapat diraih oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan nyata, perkembangan yang terjadi justru jauh dari menggembirakan dan bahkan sangat memprihatinkan. Dalam usianya yang masih muda, bangsa Indonesia "dipaksa" untuk menghadapi berbagai penderitaan, tantangan dan hambatan dalam usaha mempertahankan eksistensinya.

Salah satu tantangan yang dirasakan berat oleh hampir semua golongan masyarakat adalah krisis ekonomi yang mulai terasa pada tahun 1997 dan kemudian meluas menjadi krisis multidimensional. Pada tahun 1998, harapan untuk segera keluar dari tekanan krisis begitu membara di hati masyarakat. Berbagai pihak dengan penuh semangat berani menyatakan bahwa mereka berada di belakang gerakan mahasiswa. Guru, buruh dan pedagang kecil secara bergantian naik ke podium dan dengan lantang mengucapkan orasinya penuh semangat tentang kebobrokan Indonesia dan perlunya segera melakukan reformasi. Hymne demonstrasi mahasiswa "Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan...Rakyat bersatu menyongsong perubahan" seakan mendorong berbagai komponen masyarakat Indonesia untuk menyatukan langkah mengatasi semua hambatan dalam menuju ke cita-citanya. Akan tetapi, semua itu kini tinggal kenangan manis tentang betapa kerasnya perjuangan mereka dalam menggelindingkan reformasi. Harapan untuk lahirnya Indonesia Baru yang cerah ceria semakin lama semakin memudar, terutama ketika krisis politik dan ekonomi tidak segera berlalu dan kekuatan mahasiswa terpecah. Bahkan tidak sedikit orang yang berubah menjadi skeptis dan tidak lagi berani berharap banyak tentang kemampuan Indonesia mengatasi krisis

ini. Apalagi tantangan berat tersebut masih harus ditambah dengan pergolakann di berbagai daerah yang menuntut untuk merdeka.

Selain tekanan internal, bangsa Indonesia dewasa ini juga harus menghadapi tekanan eksternal yang tidak kalah beratnya. Salah satunya adalah proses globalisasi. Meskipun sebenarnya proses tersebut telah berlangsung lama, tetapi akhir-akhir ini pengaruhnya semakin lama dirasakan semakin kuat terhadap berbagai negara dunia ketiga, termasuk Indonesia:

We are entering a new world of economic giants and superpowers, of multinationals and military blocs, of vast communications networks and international division of labour. In such world, there is no room for medium or small-scale states, let alone submerged ethnic communities and their competing and divisive nationalisms.¹

Sebagai bangsa, mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka Indonesia dalam mengambil keputusannya "dipaksa" untuk mempertimbangkan pengaruh arus tersebut. Dari sudut pandang tersebut, berdirinya Komnas HAM dan berbagai usaha untuk memperadilan terhadap tokoh TNI dalam Pengadilan hak asasi internasional merupakan simpul-simpul penting yang mengindikasikan betapa kerasnya desakan dunia internasional terhadap bangsa Indonesia untuk memakai kriteria-kriteria global dalam kehidupannya.² Selain hak asasi manusia, pengaruh lain yang cukup gencar masuk ke Indonesia adalah demokrasi. Istilah itu semakin populer dewasa ini. Sejak tahun 1990-an kata itu begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, baik melalui diskusi para selebritis akademik maupun demonstrasi mahasiswa. Demokrasi seakan dipandang sebagai satu-satunya jalan terbaik dan paling cocok untuk menuju kebahagiaan bangsa Indonesia. Terlepas benar tidaknya pandangan tersebut, dalam

¹ Anthony D. Simth, "Toward a Global Culture?" yang terdapat pada Mike Featherstone, editor, *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity* (London: Sage Publication, 1990), hlm. 174.

² Dalam laporan tahunnya yang ke 40, organisasi pengawas HAM internasional, yaitu Amnesty International, menyebutkan bahwa situasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sejak tahun 2000 lalu makin memburuk. Lihat Kompas tanggal 31 Mei 2001.

rangka mempraktekkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa, Indonesia telah meluncurkan pemilu multi partai pada tahun 1999 dan melakukan sidang parlemen "yang paling demokratis sejak 1955".

Di atas semua itu, pengaruh paling kuat dari proses globalisasi adalah di bidang ekonomi. Kekuatan ekonomi multinasional masuk dan mendominasi hampir di semua lini, baik hulu maupun hilir. Bahkan akhir-akhir ini, pengaruh kekuatan ekonomi global juga mempengaruhi pengambilan keputusan-keputusan penting nasional. Sebagai contoh adalah keputusan pemerintah tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sering dilakukan sampai tahun 2008. Dari perspektif nasional, keputusan tersebut merupakan usaha pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran yang terutama disebabkan oleh terjadinya kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Akan tetapi, perlu dipahami pula bahwa keputusan pemerintah Indonesia tersebut tidak terlepas dari desakan kekuatan internasional. Dengan secara jelas media massa Indonesia memuat berita tentang *International Monetary Fund* (IMF) sebagai pihak yang mengusulkan dan mendesak kenaikan harga BBM dalam negeri kepada pemerintah Indonesia.

Permasalahan akan semakin menarik apabila ditanyakan: Mengapa kekuatan global mendesak kenaikan harga BBM dalam negeri kepada pemerintah Indonesia? Proses penghilangan subsidi BBM terhadap sektor industri Indonesia, dipandang dari sudut kepentingan global dan terutama kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional, akan melahirkan kompetisi yang lebih fair dari barang-barang produksi sejenis. Akan tetapi, secara nasional kenaikan harga tersebut akan membawa dampak semakin terpuruknya perekonomian Indonesia. Produk dari seluruh industri Indonesia akan secara otomatis menaikkan harganya, karena ongkos produksinya mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang Indonesia akan mengakibatkan daya saing di pasar internasional akan menurun. Pada tingkat selanjutnya, devisa Indonesia akan berkurang yang berarti juga penurunan Gross National Product (GDP) Indonesia. Dari sudut pandang ini, kematian perekonomian Indonesia dalam sistem global tinggal menunggu waktu.

Sebaliknya, kenaikan harga BBM dalam negeri membuka peluang yang sangat lebar pasar dalam negeri terhadap berbagai produk bangsa lain, termasuk di dalamnya barang-barang dari kelompok negara industri. Membanjirnya sepeda motor produk Cina (MONA) merupakan fenomena menarik pada pasar otomotif dalam negeri selama era krisis. Fenomena tersebut akan semakin menguat

dengan membanjirnya produk lain, seperti sinetron, film kartun, film layar lebar, obat-obatan dan bahkan mungkin juga kain yang selama ini menjadi tuan di negeri sendiri. Dengan memperkirakan rangkaian akibat kenaikan harga BBM dalam negeri, kiranya dapat dipahami bahwa tujuan IMF adalah untuk menjamin kelestarian Indonesia sebagai negara pinggiran.

Di tengah derasnyanya arus global terhadap bangsa Indonesia tersebut, apa yang harus dilakukan para sejarawan untuk merekonstruksi masa lalu bangsanya? "Pendekatan" dan "perspektif" seperti apakah yang "cocok" untuk menulis sejarah Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut terkait erat dengan realitas bahwa pada masyarakat Barat akhir-akhir ini mulai berkembang penulisan sejarah dengan perspektif baru, yaitu sejarah global. Oleh karena itu, secara akademik ilmu sejarah Indonesia dituntut untuk mengembangkan diri dan menempatkan proses strukturisasi masyarakat global sebagai obyek kajiannya. Selain itu, pembahasan akan menjadi semakin relevan apabila juga dipertimbangkan pengaruhnya pada usaha mempertahankan integrasi bangsa Indonesia.

Oleh karena luas dan kompleksnya permasalahan dan tantangan yang dihadapi sejarawan Indonesia, pada tulisan ini permasalahan akan dibatasi pada pengaruh globalisasi terhadap penulisan sejarah Indonesia. Agar memperoleh gambaran yang runtut, tulisan ini akan dibagi menjadi tiga pokok bahasan, yaitu:

1. Perkembangan penulisan sejarah Indonesia.
2. Globalisasi dan Penulisan sejarah.
3. Pemaknaan sejarah global bagi bangsa Indonesia.

II. Perkembangan Penulisan Sejarah Indonesia

Ilmu sejarah secara akademis bertugas menjelaskan berbagai peristiwa penting yang terjadi di masa lampau, baik dengan metode hermeneutika maupun metode interdisipliner.³ Agar dapat memenuhi kriteria keilmuan, selain mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam metode sejarah, penjelasan sejarah diharapkan dapat seobyektif

³ Penggunaan metode interdisipliner erat kaitannya dengan pendekatan multidimensional yang dimasukkan kelompok Covering Law Model oleh Ankersmit. Lihat F. R. Ankersmit, *Refleksi Tentang Sejarah*. Terjemahan Dick Hartoko. (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 121-151.

mungkin. Obyektivitas dalam sejarah dimaksudkan agar tulisan yang dihasilkan mampu semakin mendekati realitas seperti ketika peristiwa terjadi. Tulisan sejarah akan semakin berkualitas apabila penjelasannya mampu semakin mendekati peristiwa sejarah yang direkonstruksi. Meskipun demikian, setiap sejarawan menyadari bahwa obyektivitas penuh (100%) tidak mungkin dicapai. Selain karena setiap peristiwa sejarah merupakan realitas yang kompleks, faktor utama penyebab ketidaktercapaian obyektivitas penuh adalah karena sebaik apapun seorang sejarawan tidak akan mampu melepas seluruh subyektivitasnya ketika melakukan penelitian. Dengan kata lain, seorang sejarawan tidak dapat memisahkan seluruh dirinya dari obyek yang sedang ditelitinya. Selain itu, peristiwa sejarah selalu sudah berlalu, sehingga untuk menjelaskannya memerlukan aspek intuitif sejarawan.⁴

Ketidakmampuan mencapai obyektivitas penuh dalam penulisan sejarah bukan merupakan kelemahan atau bahkan bencana bagi sejarah sebagai ilmu. Sebaliknya, adanya subyektivitas justru seharusnya dipahami sebagai berkah yang sangat bernilai. Dengan diberikannya tempat bagi subyektivitas dalam ilmu sejarah berarti memberi kesempatan kepada sejarawan akademis untuk memaknai masa lampau sesuai dengan perkembangan jaman, tanpa terjebak pada pencabutan peristiwa sejarah dari konteksnya. Maksudnya, sejarawan akademis memiliki kesempatan untuk melakukan pemaknaan, tetapi tidak boleh terlepas dari fakta yang ada.

Pemaknaan itu sangat penting fungsinya, karena dengan demikian tulisan sejarah tidak hanya semata-mata menjelaskan dan menceritakan masa lampau. Sebaliknya setiap tulisan sejarah secara tersirat diharapkan dapat memberi "landasan, pedoman dan arah" kepada pembacanya.⁵ Dari sudut pandang ini, tidaklah mengherankan apabila kemudian muncul pandangan bahwa selain penjelasan tentang peristiwa sejarah, setiap tulisan sejarah juga mengandung "jiwa jaman" dari sejarawan penulisnya. Hal itu sesuai dengan pandangan Croce yang mengatakan bahwa setiap generasi berhak menulis sejarahnya

⁴ Intuisi sangat penting bagi seorang sejarawan. Dengan intuisi tersebut seorang sejarawan dapat merangkai kaitan antar fakta-fakta historis sehingga menjadi satu cerita sejarah yang utuh. Masalah intuisi dibahas secara menarik pada Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 62

⁵ Bandingkan dengan Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 11.

sendiri.

Salah satu manifestasi subyektivitas dalam penulisan sejarah tampak pada historiografi Indonesia modern. Secara ideologis historiografi modern Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perspektif kolonial dan perspektif nasional. Ketika perbedaan ideologis dapat diselesaikan, muncul kepentingan baru berdasar kewilayahan yang termanifestasikan dalam bentuk penulisan sejarah lokal sebagai "pelengkap" sejarah nasional. Oleh karena itu, apabila dipetakan, paling tidak dikenal tiga model penulisan sejarah Indonesia, yaitu kolonial, nasional dan lokal.

Pada tulisan sejarah model kolonial, masa lampau bangsa Indonesia dipahami dari sudut pandang penguasa kolonial. Akibatnya, perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia sampai masa hadirnya bangsa Barat dipandang sebagai periode penuh kegelapan. Sebaliknya, kolonialisme Barat justru dimaknai sebagai pembawa pencerahan bagi bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh kolonialisme Barat ditempatkan sebagai pembaharu yang membawa kebaikan pada masyarakat pribumi. Dengan kata lain, hubungan dengan Barat merupakan anugerah yang menjadikan masyarakat Indonesia dapat memasuki masa kecerahan sejarah.⁶

Perspektif kolonial banyak mendatangkan kritik, terutama dari masyarakat Indonesia jaman pergerakan nasional dan pasca proklamasi kemerdekaan. *Indonesia Menggugat* karya Soekarno, meskipun dimaksudkan sebagai pidato pembelaan dalam sidang pengadilan, merupakan simpul penting yang menandai adanya ketidakpuasan terhadap tulisan sejarah model kolonial. Keberatan utamanya adalah tertenggelamkannya masa lampau bangsa Indonesia, khususnya masa sebelum kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Selain itu, dalam tulisan sejarah model kolonial, tokoh-tokoh bangsa Indonesia tidak pernah tampil sebagai pembaharu, tokoh pembawa kebaikan atau pelopor. Apabila ada tokoh Indonesia yang muncul, biasanya posisi mereka adalah sebagai budak, kaum bodoh, kaum miskin atau bahkan

⁶ *Ibid.*, hlm. 19-20. Tulisan sejarah model kolonial ditulis oleh kaum penjajah yang memiliki kepentingan untuk melestarikan dan mengembangkan kolonialisme. Oleh karena itu, model itu barangkali cocok dengan "jiwa jaman" masyarakat "negara induk", sehingga mampu menjadi pedoman hidup mereka. Akan tetapi, apabila hasil tulisannya dikonsumsi oleh masyarakat jajahan, akan menimbulkan lebih banyak efek negatif, seperti rendah diri, merasa bodoh dan memendam dendam.

pemberontak.

Perspektif kolonial mengakibatkan tulisan sejarah yang dihasilkan tidak mampu memberi identitas sosial bangsa Indonesia. Sebaliknya tulisan itu lebih memberikan identitas bagi kaum penjajah. Ketidakcocokan bangsa Indonesia terhadap pemahaman masa lampau model kolonial melahirkan kebutuhan perspektif baru dalam penulisan sejarah yang mampu memberi identitas Indonesia sebagai bangsa beradab. Pada tingkat selanjutnya, perspektif baru dalam penulisan sejarah dapat diciptakan dan dikenal sebagai model penulisan sejarah nasional.

Dengan digunakannya perspektif nasional, aktor sejarah seperti R.A. Kartini, Pangeran Diponegoro dan Ir. Soekarno memiliki kesempatan untuk ditempatkan sebagai pembaharu, pejuang atau tokoh penting dalam tulisan sejarah Indonesia. Sebaliknya tokoh-tokoh yang dianggap penting dalam tulisan sejarah dari perspektif kolonial tidak sedikit yang merosot posisinya dan menempati peran sebagai penindas yang menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Kemiskinan yang dalam perspektif sejarah kolonial dipahami sebagai akibat logis dari kebodohan masyarakat, dalam perspektif nasional dimaknai sebagai akibat logis dari eksploitasi bangsa Barat. Bahkan lebih jauh, perspektif nasional dalam penulisan sejarah juga mampu memberi pemaknaan untuk masa sebelum penjajahan Barat sebagai proses integrasi menuju ke terbentuknya negara nasional Indonesia. Penempatan Majapahit dan Sriwijaya sebagai kerajaan pemersatu merupakan prestasi yang sangat bernilai dari model penulisan sejarah dengan perspektif nasional.

Dengan diraihnya berbagai prestasi oleh perspektif nasional dalam penulisan sejarah, terutama dalam rangka menjawab kebutuhan akan identitas nasional bangsa Indonesia, bukan berarti proses kreatif sejarawan Indonesia kemudian berhenti. Eksplorasi kreatif tetap dilakukan untuk menemukan hal-hal baru yang mampu menyempurnakan penulisan sejarah. Setelah melalui pencermatan yang mendalam, para sejarawan melihat bahwa perspektif nasional dalam penulisan sejarah Indonesia memiliki celah-celah kelemahan. Pertama, oleh karena skope spasialnya yang bersifat nasional, penulisan sejarah Indonesia tidak mampu menampung semua peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru tanah air, meskipun itu merupakan peristiwa sejarah. Penyaringan atau seleksi peristiwa dengan kriteria penting, kurang penting dan tidak penting dari kacamata nasional mengakibatkan berbagai peristiwa menarik di daerah tidak dapat dicatat dalam

penulisan sejarah nasional.

Selain daya tampungnya terbatas, ditinjau dari tokoh-tokoh yang muncul pada tulisan sejarah sebagai aktor penting adalah orang-orang besar yang dari kacamata struktur sosial masyarakat Jawa tradisional disebut kaum *priyayi*. Aktor yang dapat masuk dalam sejarah nasional adalah mereka yang bergelar raja, bangsawan atau orang yang bertitel seperti Ir. Soekarno dan Mr. Safruddin Prawiranegara. Sebaliknya orang-orang seperti Jalegong, Musai dan Nyi Kromo tidak memiliki kesempatan untuk ditulis dalam sejarah nasional, meskipun seandainya peran mereka juga sebagai pembaharu, pejuang dan pembawa pencerahan bagi masyarakat.

Ketidakmampuan perspektif nasional menampung seluruh dinamika masyarakat Indonesia mendorong lahirnya perspektif baru dalam penulisan sejarah yang kemudian dikenal sebagai sejarah lokal. Perspektif lokal memungkinkan tulisan sejarah memuat berbagai peristiwa penting di daerah yang apabila dilihat dari kacamata sejarah nasional tidak akan tampak. Selain itu, perspektif lokal juga dapat melengkapi dan bahkan mendukung perspektif nasional dengan bukti-bukti yang berasal dari daerah.

Oleh karena skope spasialnya relatif kecil, penulisan sejarah lokal lebih mungkin untuk menampilkan berbagai peristiwa secara lebih rinci atau detail. Dari kelengkapan data yang dimiliki, perspektif lokal juga memungkinkan sejarawan untuk menunjukkan adanya pola yang menyimpang dari kecenderungan yang terjadi pada level nasional. Sebagai contoh adalah proses involusi pertanian yang terjadi pada akhir abad XIX. Penelitian sejarah menunjukkan bahwa di beberapa daerah tidak terjadi involusi. Keunikan yang terdapat di daerah itu hanya dapat tercover oleh perspektif lokal dalam penulisan sejarah. Selain itu, oleh karena meneliti peristiwa di daerah, perspektif lokal juga membuka kesempatan luas untuk memuat orang-orang biasa (*kawulo alit*) sebagai tokoh-tokoh daerah untuk dicatat menjadi pembaharu, pejuang atau pembawa pencerahan bagi masyarakatnya.

Dibandingkan dengan kemunculan perspektif nasional yang menggantikan posisi perspektif kolonial, perspektif lokal tidak dimaksudkan untuk berdiri berhadap-hadapan dengan perspektif nasional sebagai lawan. Sebaliknya, perspektif lokal lebih merupakan gerakan pembaharuan untuk menutupi celah-celah kelemahan yang terdapat pada perspektif nasional. Dari sudut pandang itu, fungsi

perspektif lokal dalam penulisan sejarah Indonesia ditujukan untuk mendampingi, melengkapi dan menyempurnakan berbagai gambaran yang terdapat pada penulisan sejarah perspektif nasional yang sudah ada sebelumnya.

III. Globalisasi dan Penulisan Sejarah

A. Globalisasi

Salah satu peristiwa yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia adalah terjadinya proses globalisasi. Pada umumnya globalisasi dipahami sebagai proses semakin menyatunya bangsa-bangsa dunia. Lahirnya berbagai istilah seperti *global economy*, *global village*, dan *global culture* merupakan beberapa indikasi tentang terjadinya proses pembentukan sistem yang diharapkan mampu mencakup hampir seluruh bangsa. Sebagai suatu realitas, paling tidak ada lima dimensi yang dapat ditengarai sebagai simpul penting proses semakin menyatunya masyarakat manusia di dunia ini. Pertama adalah terjadinya mobilitas penduduk antar etnik yang berlangsung dalam intensitas dan frekuensi semakin tinggi, seperti dengan menjadi turis, pengunjung, pekerja asing dan bahkan orang buangan.⁷

Fenomena perpindahan penduduk untuk mencari pekerjaan di daerah lain atau bahkan di negara lain dewasa ini bukan lagi dipandang sebagai pilihan yang aneh di masyarakat. Di Indonesia, perpindahan penduduk dapat dilihat antara lain dari kasus kota Jakarta. Tingginya kepadatan penduduk kota Jakarta, salah satunya adalah karena terjadinya urbanisasi besar-besaran dari daerah. Terbatasnya kesempatan kerja di daerah asal dan peluang untuk memperoleh kehidupan lebih baik yang ditawarkan kota besar mendorong penduduk pedesaan untuk mengadu nasib dengan menjadi kaum urban.

Suatu perkembangan yang menarik apabila akhir-akhir ini merantau ke Jakarta bukan lagi menjadi satu-satunya impian penduduk daerah miskin. Ketika kesempatan kerja di perkotaan sudah semakin terbatas, menjadi pekerja di luar negeri merupakan pilihan yang tidak kalah menarik bagi mereka. Apalagi penghasilan yang dijanjikan jauh di atas penghasilan yang dapat diperoleh oleh pekerjaan sejenis di dalam

⁷ Arjun Appadurai, "DisJuncture and Difference in the Global Culture Economy" yang terdapat pada Mike Featherstone, *op. cit.*, hlm. 296-310.

negeri. Kepentingan ekonomi itu menjadi salah satu faktor pertimbangan yang mendorong masyarakat, terutama kelas bawah, untuk berlomba mencari pekerjaan di luar negeri. Hal itu antara lain tampak dari jumlah peminat untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang tidak pernah surut meskipun berita tentang berbagai masalah yang dihadapi di negara lain cukup gencar diberitakan.⁸

Secara global, indikasi lain yang dapat digunakan untuk melihat betapa mobilitas penduduk dunia semakin lama semakin tinggi adalah semakin meningkatnya jumlah pekerja asing dari tahun ke tahun. Di Amerika Serikat, jumlah imigran yang menjadi pekerja berkembang dari sekitar 7% pada tahun 1985 dan diperkirakan menjadi sekitar 22% sepuluh tahun kemudian. Bahkan di negara-negara Eropa, pekerja asing telah mencapai sekitar 30% dari jumlah seluruh pekerja nasional.⁹

Aspek ke dua adalah teknologi. Teknologi dewasa ini merupakan salah satu kunci penting dari proses globalisasi. Di bidang teknologi transportasi, manusia telah mampu menciptakan alat transportasi yang semakin baik. Sebagai contoh adalah perkembangan kemampuan yang dimiliki pesawat Boeing. Pada tahun 1969 pabrik pesawat Boeing berhasil melakukan pengembangan dengan mengeluarkan pesawat jumbo jet 747 yang berbadan lebar dan mampu mengangkut 400 orang penumpang sekaligus. Langkah tersebut mampu merevolusi tatanan lalu lintas udara internasional, karena dengan semakin banyak penumpang dapat diangkut berarti biaya operasional perusahaan penerbangan dapat ditekan. Selain menyempurnakan seri 747 dengan digitalisasi cockpit dan kemampuan terbang nonstop sampai 13 400 km, pada tahun 1980-an pabrik pesawat Boeing membuat kejutan lagi dengan mengeluarkan pesawat Boeing 767 yang merupakan pesawat berbadan lebar pertama yang menggunakan mesin ganda.¹⁰

Selain semakin cepat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan waktu, perkembangan teknologi juga mampu

⁸ Di Yogyakarta, salah satu kasus yang mencuat ke media massa adalah penipuan terhadap calon Tenaga Kerja Indonesia yang batal berangkat ke luar negeri karena ditinggal lari pengelola lembaga penyalur tenaga kerjanya. Lihat *Bernas* terbitan tanggal 1 September 2001.

⁹ John Maxwell Hamilton, *Entangling Alliance*. (Washington: Seven Locks Press, 1990), hlm. 9.

¹⁰ Lihat *Kompas* 12 September 2001.

menjadikan tersedianya sarana transportasi yang semakin murah. Hanya dalam jangka waktu sekitar 34 tahun (1937-1973) tarif penerbangan dari Jepang ke Amerika Serikat menurun sekitar 85%. Sepuluh tahun kemudian tarif itu menurun lagi sampai 50%. Kondisi tersebut sangat berbeda apabila dibandingkan dengan beberapa abad sebelumnya. Dalam rangka melihat sejarah alat transportasi tersebut, Paul Valery mencatat bahwa "*Napoleon moved no faster than Julius Caesar*". Akan tetapi, sejak terjadinya revolusi industri, alat transportasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dewasa ini penerbangan komersial telah menggunakan pesawat dengan kecepatan lebih dari 500 mil per jam. Di bidang militer, penerbangan dengan kecepatan di atas kecepatan suara dewasa ini bukan lagi dianggap sebagai hal yang menakutkan.

Perkembangan pesat juga dialami bidang teknologi komunikasi. Salah satu tahap penting perkembangannya adalah ditemukannya kabel serat optik (*fiber-optic cable*) yang memiliki kemampuan jauh lebih baik dari pada kabel tembaga. Telepon dengan tiga kabel tembaga dan dengan didukung satelit hanya mampu melayani 20 000 sambungan komunikasi. Sebaliknya dengan menggunakan kabel serat optik mampu melayani 80 000 sambungan secara simultan pada tahun 1991. Selain itu, serat fiber juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi menjadi lebih cepat tersambung dengan suara yang lebih jernih.

Dalam rangka melihat pemanfaatan dan perkembangan teknologi komunikasi, pada tahun 1990 John Naisbitt mencatat:

On December 1988, the first fiber-optic telephone cable across the Atlantic went into service. This cable can carry 40,000 calls simultaneously, tripling the volume of the three existing copper cables plus satellites....

A fiber-optic cable across the Pasific went into service in April 1989, linking the United States and Japan. North America, Europe, Asia and Australia are being strung with fiber-optic cable. By 1992 more than 16 million miles of fiber-optic cable will be in place.... A second transatlantic fiber-optic cable that will carry 80,000 simultaneous telephone calls is scheduled to go into service in 1991.¹¹

¹¹ John Naisbitt and Patricia Aburdene, *Megatrends 2000: Ten New Directions for the*

Dalam bidang teknologi informasi, berkat kemajuan yang telah dicapai, Pak Kromo yang tinggal di daerah Tepus Wonosari dengan kecepatan yang hampir sama dengan Alfonso di Paraguay dalam mengetahui dan mencermati berita tentang Olimpiade 2000 yang berlangsung di Sydney Australia pada tahun lalu. Begitu pula sebaliknya dengan berita Sidang Istimewa MPR yang mencopot Gus Dur dari kursi kepresidenan serta penunjukan Megawati sebagai penggantinya. Berita itu dapat diikuti dengan seksama oleh masyarakat Belanda dan Amerika Serikat sesaat setelah redaksi surat kabar dan kantor berita memformatnya ke dalam internet. Dalam kondisi seperti itu, arus perpindahan (pengiriman dan penerimaan) informasi berlangsung dengan sangat cepat dan tidak lagi dapat dibatasi oleh tembok-tembok geopolitik.

Masalah lain yang menarik tentang teknologi adalah distribusinya. Dalam kenyataannya, distribusi teknologi tidak hanya ditopang oleh satu kekuatan, seperti hanya oleh kepentingan ekonomi atau hanya oleh kekuatan politik. Sebaliknya, distribusinya didukung oleh jaringan kepentingan dan kekuatan yang kompleks:

The odd distribution of technologies, and thus the peculiarities of these technoscapes, are increasingly driven not by any obvious economies of scale, of political control, or of market rationality, but of increasingly complex relationships between money flows, political possibilities and the availability of both low and highly-skilled labour.¹²

Aspek yang tidak kalah penting adalah modal.¹³ Secara tradisional, modal dipahami sebagai salah satu faktor produksi, selain bahan baku, tenaga kerja dan pemasaran atau distribusi. Akan tetapi, perkembangan ekonomi dunia yang semakin kompleks dan berskala besar menjadikan modal tidak dapat lagi hanya dipahami sebagai salah satu faktor produksi seperti yang selama ini terjadi. Sejak pasar modal transnasional pertama ditemukan oleh sebuah bank di Uni Soviet, uang menjadi salah satu komoditi penting dalam perdagangan internasional.

1990's. (New York: William Morrow and Company Inc. , 1990), hlm. 23.

¹² Mike Featherstone, *op. cit.* , hlm. 297-298.

¹³ Perkembangan teknologi komunikasi dan modal pada level internasional antara lain dapat disimak pada Paul Kennedy, *Preparing for the Twenty First Century* (New York: Random House Inc. , 1993) hlm. 47 – 69.

Dalam waktu singkat sindikat peminjaman uang dan konsorsium bank internasional muncul dan berkembang.¹⁴

Pergerakan modal dewasa ini berlangsung dengan sangat cepat, misterius dan sulit untuk diamati seperti fluktuasi harga yang terjadi di pasar modal, nilai tukar mata uang dan spekulasi komoditi perdagangan yang melibatkan uang dalam jumlah sangat besar dan melampaui batas negara dengan "tanpa arah yang jelas". Salah satu kelompok yang sering dipandang sebagai aktor kontroversial dalam pasar modal internasional adalah para spekulator. Richard J. Barnet mencatat:

"Dua hari sebelum Presiden Nixon mengumumkan kebijakan ekonomi baru untuk memperkuat dollar, pada tanggal 15 Agustus 1971, Donald G. Robbins, Jr., pemimpin keuangan Singer, memperbesar banjir dollar secara tak terduga dengan menjual \$ 20 juta untuk memperoleh mata uang Frank Swiss dan mata uang Pound Inggris, karena banyak perusahaan multinasional lainnya juga menukar mata uang dollar. Menurut *Newsweek*, mereka adalah "kekuatan utama di belakang seluruh krisis mata uang"...

Dengan meningkatkan penggunaan system manajemen uang kontan (*cash management systems*) secara terpusat melalui komputer, korporasi sejagad mempunyai kedudukan yang unik dalam memainkan pasar mata uang dan modal dunia...Karena ukuran dan kekuatannya, mereka dapat menarik modal keuangan setempat, khususnya dari negara-negara miskin.¹⁵

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang sampai sekarang masih merasakan betapa sakitnya pada tahun 1997 terlindas "kegilaan" nilai tukar mata uang. Kepanikan dalam menghadapi

¹⁴ Salah satunya adalah perusahaan patungan yang bernama Orion Bank. Perusahaan itu diorganisasi oleh Chase Manhattan (USA), National Westminster (Inggris), Royal Bank of Canada (Kanada), Westdeutsche Landesbank Girocentral (Jerman), Credito Italiano (Italia) dan Nikko Securities of Japan (Jepang). Lihat Richard J. Barnet and Ronald E. Muller, *Menjangkau Dunia: Menguk Kekuasaan Perusahaan Multinasional*. Terjemahan Setiawan Abadi (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. 21.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 22

ketidakpastian pergerakan modal internasional menjadikan Indonesia justru mengalami penderitaan jauh lebih berat dibandingkan dengan negara lain yang mengalami peristiwa sama.

Aspek media merupakan kekuatan yang sangat penting dalam era globalisasi. Di bidang media cetak, dewasa ini telah begitu banyak media massa yang memiliki jangkauan global, baik ditinjau dari segi produsen maupun segi konsumen. Apabila dalam beberapa dekade media cetak global didominasi oleh *International Herald Tribune*, kini telah memperoleh saingan seperti *Wall Street Journal*, *Newsweek*, *Times* dan sebagainya yang memiliki jumlah pelanggan menjangkau seluruh benua. Bahkan majalah *Economist* dibaca oleh lebih dari 170 negara. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada sebuah toko dapat ditemukan majalah, surat kabar dan buku dari berbagai belahan dunia. Ditinjau dari segi produksinya, tidak sedikit media cetak yang melibatkan berbagai bangsa.¹⁶

Sejajar dengan perkembangan media cetak yang dengan cepat mengglobal, media elektronika pun dewasa ini mampu menyuguhkan berbagai program dari luar negeri. Sebagai contoh adalah *Evening News with Dan Rather* yang ditayangkan oleh CBS di Amerika Serikat. Acara tersebut setiap hari ditayang ulang oleh stasiun televisi Perancis pada jam 08.00 pagi. Tidak ketinggalan, Jepang juga menayangkan program tersebut bersama *Lehrer News Hour*.

Di Indonesia, sejak kemunculan berbagai stasiun televisi swasta, persaingan ketat terjadi baik dalam program yang ditawarkan kepada para pemirsa maupun jumlah jam tayang. Seperti di negara-negara lain, stasiun televisi Indonesia juga banyak mengimpor berbagai program dari luar negeri, terutama film-film seri. Dalam beberapa dekade, film seri dari Amerika Serikat mendominasi siaran televisi Indonesia. Akan tetapi, sedikit demi sedikit dominasi itu berkurang oleh kehadiran film-film seri dari Jepang dan India. Bahkan boleh dikatakan, untuk film seri animasi anak-anak, dominasi Amerika Serikat telah tergeser oleh Jepang.

Salah satu hal yang menarik dari fenomena media massa dewasa ini adalah pengaruhnya yang besar terhadap terjadinya perubahan pola pikir dan pola tindak masyarakat. Ketika menayangkan program berita sekalipun, kecenderungannya stasiun televisi tampak berusaha untuk

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 135.

tidak hanya menyampaikan berita. Media massa melangkah lebih lanjut dari sekedar penyampai, tetapi terdapat *trend* untuk menunjukkan keberpihakan dan kepentingannya melalui jalan membahas suatu masalah nyata secara mendalam dari berbagai aspek. Bahkan tidak jarang media massa mencoba menampilkan atau menawarkan berbagai elemen, seperti karakter, plot dan bentuk-bentuk lain, yang dapat dibangun oleh gagasan akan "kehidupan imajiner", baik yang bersetting dunia maupun planet lain. Pola itu menjadikan media tidak hanya sebagai penyampai informasi tetapi juga memainkan peran penting sebagai pembangun opini dan fantasi masyarakat.

Sejajar dengan pembentukan opini yang dilakukan oleh media massa, karena juga terkait dengan pembentukan image, dewasa ini kita melihat penyebaran yang luas dari aspek ideologi dengan intensitas cukup tinggi. Biasanya penyebaran ideologi dilakukan melalui kegiatan politik, baik oleh negara maupun lembaga lain yang bergerak di bidang politik. Kebebasan, kemakmuran, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, keterwakilan aspirasi rakyat dan demokrasi yang menjadi "biang" istilah-istilah sebelumnya terlihat semakin mendunia, termasuk pada bangsa-bangsa yang secara kultural tidak memiliki "bakat".¹⁷ Salah satu contoh penyebaran ideologi yang cukup spektakuler adalah usaha *State, War, and Navy Coordination Committee* (SWNCC) Amerika Serikat dalam membentuk dan melahirkan "Jepang Baru" setelah dapat ditaklukkan dalam Perang Dunia II (1939 - 1945). Secara sistematis penyebaran ideologi dirancang oleh *Subcommittee for the Far East* yang telah menyelesaikan draft awal kebijakan politik AS terhadap Jepang apabila penaklukan berhasil dilakukan. Dalam rencana yang nantinya secara resmi menjadi isi pokok Deklarasi Postdam antara lain disebutkan adanya demiliterisasi, penjaminan kebebasan individu dan pembentukan pemerintahan yang bertanggungjawab. Secara operasional proposal pembangunan Jepang Baru tertuang dalam *United States Initial Postsurrender Policy of Japan* yang dilaksanakan oleh Jendral MacArthur sebagai *Supreme Commander for Allied Powers* (SCAP).¹⁸

¹⁷ Kebebasan, kemakmuran rakyat, hak asasi manusia dan sejenisnya yang dipayungi dengan kata demokrasi sebenarnya dibangun dari serpihan-serpihan pandangan dunia masyarakat Eropa periode Pencerahan Akal Budi (*Aufklärung*). Oleh karena itu, secara kultural bangsa-bangsa lain yang tidak "serumpun" dengan budaya Eropa secara kultural dapat dipahami sebagai bangsa yang tidak memiliki "bakat".

¹⁸ Hugh Borton, *Japan's Modern Century*. Second edition. (New York: The Ronald Press Company, 1992), hlm 460.

Dalam ketidakberdayaan sebagai bangsa yang kalah perang, Jepang dipaksa untuk menerima segala sesuatu yang diputuskan oleh Barat yang termanifestasi dari berbagai langkah MacArthur. Pada bulan Oktober 1945, SCAP mengeluarkan perintah pertama yang diberi judul *Removal of Restriction on Political, Civil, and Religious Liberties* yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Jepang. Jaminan terhadap kebebasan yang terkandung pada perintah tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi yang melandaskan diri pada kebebasan dan kemandirian individu rakyat. Agar penerapan demokrasi di Jepang lebih terjamin, pada tahun 1946 dikeluarkan Undang-Undang Dasar baru yang lebih banyak mengekspresikan *western culture* dari pada mengembangkan milik Jepang sendiri.¹⁹ Kekuasaan *Tenno* (kaisar) yang secara tradisi sangat kuat, baik di bidang politik maupun sosial, seperti tertuang pada Undang-Undang Dasar Kekaisaran sebelumnya, dipangkas habis. Pada Undang-Undang Dasar yang baru, Kaisar lebih ditempatkan sebagai simbol persatuan masyarakat Jepang.

Kelima aspek tersebut secara nyata memberikan gambaran akan adanya saling keterhubungan, saling keterkaitan, dan bahkan saling ketergantungan antar bangsa-bangsa di dunia ini. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila kemudian masyarakat terdorong, baik dengan keterpaksaan maupun sukarela, pada arah terbentuknya struktur global. Dibentuknya PBB, ASEAN, OKI, WTO, APEC, OPEC dan berbagai organisasi lintas bangsa lainnya merupakan indikasi yang jelas bahwa pembangunan struktur di atas level struktur nasional menjadi kebutuhan yang tidak dapat lagi terelakkan untuk menjawab tantangan aktual. Seajar dengan itu, keikutsertaan suatu negara sebagai anggota tetap dalam berbagai organisasi lintas bangsa dipahami sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi, paling tidak untuk dapat mempertahankan hidup.

B. Penulisan Sejarah Global

Proses strukturisasi masyarakat yang mengarah ke terbentuknya sistem global merupakan fenomena historis yang menarik untuk dicermati. Bagai gelombang magnetis yang memiliki kekuatan sangat besar, globalisasi mampu menarik banyak negara dan bangsa untuk

¹⁹ Lihat pada Ryosuke Ishii, *Sejarah Institusi Politik Jepang* (Jakarta: Gramedia, 1988)

masuk ke dalam arusnya. Simbol-simbol kebudayaan global, seperti fast food, jeans, komputer, bursa efek, IPTEK, demokrasi dan hak asasi manusia, menjadi sangat populer di berbagai pelosok dunia, termasuk di daerah pedesaan dan pegunungan. Tidak terkecuali dengan bangsa Indonesia. Meski kekuatan penentang tidak dapat dikatakan kecil, Indonesia akhirnya ikut terbawa arus globalisasi yang diakui atau tidak memang sangat besar kekuatan pengaruhnya.

Sebagai gambaran betapa besar pengaruh globalisasi terhadap bangsa Indonesia antara lain dapat disimak dari perkembangan gerakan yang berusaha untuk mendesak penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Paling tidak sejak awal dasawarsa 1990-an tuntutan demokratisasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia semakin lama semakin mengemuka. Hal itu antara lain tampak pada perkembangan gerakan mahasiswa. Pada tahun 1980-an mahasiswa mencoba mengekspresikan keberpihakan mereka terhadap "kebenaran" dengan jalan menggelar diskusi-diskusi, baik pada tingkat jurusan, antar jurusan maupun antar fakultas. Pada perkembangan selanjutnya, karena model lama dirasa tidak dapat efektif untuk mengubah perilaku pemerintah, pola gerakan mahasiswa berubah ke model unjuk rasa yang pada akhir tahun 1990-an memuncak dengan terjadinya gelombang besar demonstrasi. Pada level atas, demokratisasi juga dapat disimak dari mulai diikutsertakannya semakin banyak pihak dalam menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara, meski ditinjau dari sisi kekuatan tawarnya terhadap pemerintah masih lemah. Meski juga masih sangat lemah, proses demokratisasi dapat pula dilihat pada pembentukan Badan Perencana Pembangunan Daerah sebagai pendamping BAPPENAS.

Proses masuknya bangsa-bangsa ke gelombang globalisasi merupakan peristiwa yang sungguh menarik untuk dicermati. Daya tarik tersebut antara lain dapat disimak dari besarnya perhatian yang diberikan oleh masyarakat akademik. Di dunia akademik, terutama di negara-negara Barat, berbagai bidang studi mulai mengembangkannya sebagai bidang kajian tersendiri, seperti *Global Study* di Ohio University serta dimasukkannya Global Education sebagai mata kuliah di Fakultas Pendidikan.²⁰

²⁰ Melalui IBRD Loan, Global Education masuk ke kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia dan dikemas menjadi mata kuliah Perspektif Global yang ditempatkan sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa PGSD seluruh Indonesia.

Perhatian besar terhadap proses globalisasi juga diberikan oleh ilmu sejarah. Dengan kata lain, penelitian tentang proses globalisasi juga dilakukan oleh ilmu sejarah. Proses globalisasi menjadi obyek baru yang menantang di samping sejarah nasional dan sejarah lokal yang telah ada sebelumnya. Pengambilan sejarah global bukan berarti ilmu sejarah mengubah diri menjadi seperti ilmu-ilmu sosial yang menjadikan fenomena yang terjadi pada masa kini sebagai obyek studinya. Ilmu sejarah tetap berjalan pada jalurnya, yaitu mempelajari peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Sejarah tidak tertarik untuk membuat hukum-hukum atau teori tentang masyarakat seperti ilmu-ilmu sosial lainnya. Terkait dengan proses globalisasi yang terjadi dewasa ini, ilmu sejarah lebih mengkonsentrasikan diri pada usaha untuk menyoroti, memahami dan memaknai gerak sejarah saling keterhubungan, saling keterkaitan dan saling ketergantungan antar bangsa-bangsa yang mengarah ke terbentuknya sistem global. Dengan kata lain, sejarah lebih mengarahkan perhatiannya pada jejak-jejak peradaban manusia yang meretas jalan ke terbentuknya komunitas global. Mengapa dan bagaimana sistem global dibangun oleh masyarakat manusia? Bagaimana sejarawan memaknai tulisan Polybus dalam *Universal History* pada abad 2 SM yang mengatakan bahwa "Pada awalnya setiap kejadian tidak ada saling keterkaitan...tetapi sejak itu (Ekspansi Kekaisaran Romawi) segala peristiwa terikat dalam satu bendel"?

Dewasa ini telah banyak buku sejarah ditulis dengan gaya penulisan baru, yaitu perspektif global. Di antaranya adalah *The Human Venture: The Globe Encompassed* karya Anthony E. (1986) dan *The Global Experience* karya Philip F. Riley (1992). Secara sekilas, apabila buku-buku tersebut dibaca akan memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang proses berkembangnya kerjasama yang indah antar bangsa-bangsa di dunia. Bahkan barangkali akan melahirkan kebanggaan bagi pembacanya sebagai bagian integral dari warga dunia dan secara tidak sadar mendukung proses pembentukan sistem global yang sedang berlangsung.

Diperolehnya pemahaman dan kebanggaan oleh para pembaca terhadap sejarah global adalah sesuatu yang manusiawi dan bukan merupakan kesalahan. Tulisan sejarah merupakan hasil pemaknaan penulisnya terhadap masa lampau dengan tujuan atau harapan dapat

memberi "landasan, pedoman dan arah" kepada pembacanya.^{21[21]} Dari sudut pandang ini, apabila mampu memberikan pemahaman dan pencerahan kepada para pembacanya, berarti suatu tulisan sejarah berhasil melaksanakan misinya.

IV. Memaknai Sejarah Global bagi Indonesia

Permasalahan yang muncul adalah bahwa pemahaman dan kebanggaan sebagai warga dunia itu akankah mampu mendorong pembacanya untuk bangga dan menghargai bangsanya sendiri. Selama ini yang berkembang di negara-negara terbelakang, khususnya Indonesia, adalah kekhawatiran akan terlupakannya atau paling tidak berkurangnya identitas kolektif sebagai warga bangsa Indonesia. Sebaliknya, warga masyarakat justru akan mengambil identitas baru sebagai warga masyarakat global, karena merasa lebih bangga dan berharga. Kekhawatiran itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Ungkapan bahwa nasionalisme Indonesia dewasa ini telah luntur yang cukup populer beberapa waktu lalu merupakan indikasi bahwa identitas nasional sedang mengalami krisis.

Globalisasi dengan segala atribut pengikutnya, seperti hak asasi manusia, pasar bebas, demokrasi dan penggunaan perspektif global dalam tulisan sejarah, sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang "alami". Perlu dipahami bahwa di belakang proses itu terdapat kepentingan dan kekuatan global, terutama kepentingan ekonomi negara-negara industri, yang menginginkan keuntungan maksimal. Selain itu, perlu disadari juga bahwa globalisasi tidak secara otomatis mengangkat derajat negara-negara dan bangsa-bangsa miskin ke tingkat kesejahteraan yang sejajar dengan negara-negara maju. Perusahaan multinasional yang menjadi pemeran utama dalam proses globalisasi adalah gurita pencari keuntungan dan sama sekali bukan dewa penolong orang miskin.

Sebuah korporasi adalah struktur bisnis yang tujuan hidup satu-satunya adalah mencari keuntungan dengan menghasilkan produk-produk dengan biaya serendah mungkin dan menjualnya dengan harga setinggi

²¹ Bandingkan dengan Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. op. cit. , hlm. 11.

mungkin. Tidak jadi soal apakah produk itu benar-benar berguna atau merugikan; yang penting ia dikonsumsi dalam jumlah yang semakin besar. Oleh karena segala sesuatu yang dikerjakan korporasi benar-benar bertujuan akhir penciptaan keuntungan, maka ia tidak memberikan kepuasan pribadi kepada para pekerjanya, tak menimbulkan perasaan menyumbangkan sesuatu yang berfaedah bagi masyarakat.²²

Bahkan sebaliknya, di negara-negara miskin, unsur-unsur globalisasi tidak jarang justru menjadi penghancur potensi-potensi lokal. Kasus penghasil kue tapioka (*tapioca cracker*) di Desa Muara, Subang merupakan salah satu kisah tragis betapa globalisasi justru menghancurkan mereka. Sejak tahun 1990 di daerah Subang mulai muncul pengusaha-pengusaha barang sejenis dari kota yang membawa perlengkapan modern dengan kapasitas produksi yang jauh lebih besar dan dilengkapi armada penjualan bermobilitas tinggi. Akibatnya, para pengusaha tradisional yang memiliki kendala dalam permodalan dan penjualan akhirnya harus menutup usaha mereka alias bangkrut.²³ Kasus sejenis banyak terjadi di kota-kota lain ketika para pengusaha kecil harus berhadapan dengan kekuatan perusahaan multinasional.

Sebuah refleksi yang maknanya sangat mendalam diberikan oleh Shigeru Ban, seorang arsitek Jepang, tentang makna modernisasi:

For Asian people generally, the modernization was westernization. And we couldn't continue our tradition into modernizing. So, as soon as we modernize, or as soon as we get to the question or problem of how to modernize our culture and tradition, that means we have to end our tradition, and suddenly we have to do a strange mixture of tradition and western idea. For Western people modernization was on the same track, very naturally they could modernize with their tradition, because it's on the same track. But for Asian people modernization is different track. It's as if suddenly we

²² Lihat Richard J. Barnett and Ronald E. Muller, *op. cit.*, hlm. 16.

²³ *Kompas* 3 Mei 2001 atau lihat pada Asia DHRRA Secretariat, *The Impact of Globalization on the Social-Cultural of Grassroots People in Asia*. Jakarta: Grasindo, 1998.

have to take a train for a horse ride.²⁴

Dari kutipan itu secara jelas terlihat bahwa perbedaan kebudayaan, menjadikan modernisasi justru lebih banyak mengorbankan kepentingan pengembangan kebudayaan dan tradisi asli bangsa-bangsa Asia, termasuk Indonesia. Bahkan modernisasi justru menghancurkan tradisi dan kebudayaan asli. Apabila hal itu terjadi, dapat diperkirakan bangsa Asia pada umumnya dan Indonesia khususnya akan kehilangan identitas kulturalnya sebagai bangsa.

Pada bidang penulisan dan pengajaran sejarah, apabila tidak hati-hati menyikapinya, dikhawatirkan justru akan melahirkan kembali perspektif kolonial. Pada jaman penjajahan Belanda, sejarah Indonesia pernah ditulis dan dimaknai dari kacamata kaum penjajah. Dengan kata lain, pada tulisan sejarah model kolonial tersebut, masa lampau bangsa Indonesia dipahami dari sudut pandang penguasa kolonial. Akibatnya, perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia sampai masa hadirnya bangsa Barat dipandang sebagai periode penuh kegelapan. Sebaliknya, kolonialisme Barat justru dimaknai sebagai pembawa pencerahan bagi bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh kolonialisme Barat ditempatkan sebagai pembaharu yang membawa kebaikan pada masyarakat pribumi. Dengan kata lain, hubungan dengan Barat merupakan anugerah yang menjadikan masyarakat Indonesia dapat memasuki masa kecerahan sejarah.²⁵ Apabila perspektif kolonial kembali hidup dan menjadi roh dari sejarah Indonesia dengan perspektif global berarti berbagai hal yang berasal dari Barat ditempatkan sebagai "nilai-nilai universal" yang penting untuk dikembangkan. Sebaliknya berbagai hal yang dilahirkan bangsa Indonesia sendiri dipandang sebagai manifestasi dari kebodohan dan kegelapan, sehingga perlu ditinggalkan.

Barangkali sebutan "pemberontak" kepada tokoh-tokoh pribumi

²⁴ Lihat pada Eko Agus Prawoto, *Memaknai Arsitektur Dalam Zaman Yang Berubah*. Makalah pada seminar Manusia dan Pengembangan IPTEK yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2001.

²⁵ *Ibid*, hlm. 19-20. Tulisan sejarah model kolonial ditulis oleh kaum penjajah yang memiliki kepentingan untuk melestarikan dan mengembangkan kolonialisme. Oleh karena itu, model tersebut barangkali cocok dengan "jiwa jaman" masyarakat "negara induk", sehingga mampu menjadi pedoman hidup mereka. Akan tetapi, apabila hasil tulisannya dikonsumsi oleh masyarakat jajahan, akan menimbulkan lebih banyak efek negatif, seperti rendah diri, merasa bodoh dan memendam dendam.

yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah dan atau penguasa kolonial akan berulang lagi untuk para pemimpin masyarakat Indonesia dan negara dunia ke tiga lain yang tidak sesuai dengan "nilai-nilai universal" atau trend global, meski dengan istilah yang berbeda. Anti demokrasi, otoritarian, tiran, fundamentalis, teroris dan penjahat HAM merupakan beberapa contoh istilah yang mungkin digunakan untuk menyebut pemimpin atau kelompok yang tidak sesuai dengan atau paling tidak bersikap dingin terhadap kepentingan Barat.

Kritik yang dapat diajukan kepada pengguna perspektif global dalam penulisan dan pengajaran sejarah nasional adalah tulisan sejarah yang dihasilkannya sebagai pengalaman kolektif akankah mampu menjadi kebanggaan dan penyemangat masyarakat Indonesia untuk melangkah ke masa depan? Merupakan sesuatu yang memprihatinkan apabila tulisan sejarah justru melahirkan sikap rendah diri, penyesalan serta perasaan malu terhadap masa lalu bangsanya sendiri.

Dalam salah satu pidatonya, dengan istilah Jas Merahnya, Soekarno pernah mengingatkan bangsa Indonesia untuk tetap bersandar kepada sejarah. Dalam rangka melihat secara lebih jernih proses globalisasi yang terjadi dewasa ini, kiranya peringatan tersebut cukup penting sebagai pijakan. Perlu dipahami bahwa globalisasi bukan merupakan suatu proses yang murni alamiah. Apabila dicermati secara mendalam, tidak sedikit unsur-unsur dari globalisasi yang mirip dengan unsur-unsur yang terdapat pada kolonialisme modern yang pernah dijalankan Belanda di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia secara jelas dituliskan bahwa *Cultuurstelsel* merupakan sebuah program yang berhasil dijalankan dengan cukup baik. Dikatakan berhasil karena dari sudut pandang penjajah, program tersebut mampu mendatangkan keuntungan besar dan bahkan mengantar negara induk Belanda ke tahap industrialisasi. Meskipun korban di negeri jajahan telah berjatuh,²⁶ program itu berlanjut. Hasilnya adalah kesuksesan Belanda dalam melakukan industrialisasi serta melahirkan kelas kapitalis yang memiliki basis pada industri modern dan pasar multinasional.²⁷

²⁶ *Cultuurstelsel* dari proposal, pelaksanaan sampai dengan dampaknya dibahas secara sangat baik oleh Robert Van Niel, *Java Under The Cultivation System* (Leiden: KITLV Press, 1992).

²⁷ F. A. Sutjipto, ed. , *Sejarah Nasional Indonesia IV: Indonesia dalam Abad 18 dan 19*. (Jakarta: Depdikbud, 1975), hlm. 66 – 89. Lihat juga Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*. Jilid 2 (Jakarta: Gramedia, 1992).

Didorong oleh keinginan memperbesar keuntungan serta dengan memperhitungkan kendala dan keterbatasan yang dimiliki negeri induk, kaum kapitalis Belanda berkehendak untuk memperluas usaha mereka di negara-negara jajahan, termasuk ke Indonesia. Satu kebetulan sejarah yang menguntungkan, karena kaum humanis yang melihat kesengsaraan penduduk pribumi sedang bergiat untuk mengakhiri *Cultuurstelsel*. Akhirnya, dengan ditandai oleh keluarnya Undang-Undang Gula pada tahun 1870, dua kepentingan tersebut mampu mengakhiri kekejaman proyek *Cultuurstelsel* dan menggantikannya dengan politik kolonial modern. Ciri khas periode ini adalah berlakunya pasar bebas, yaitu semua kegiatan ekonomi dipegang oleh swasta dan kekuasaan pemerintah dalam bidang ekonomi terbatas pada penyediaan prasarana dan iklim usaha yang kondusif. Berlakunya kebijakan baru itu dalam kenyataannya tidak meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi. Bahkan sebaliknya, kesengsaraan meluas ke daerah-daerah pertanian padi.²⁸

Kolonialisme dengan segala asesorisnya yang berlangsung sejak abad XVI mengakibatkan dunia terbelah menjadi dua bagian, yaitu negara-negara kapitalis sebagai pusat dan negara-negara sisanya sebagai pinggiran. Hubungan antar dua bagian itu adalah hubungan saling tergantung. Bagaikan dua sisi pada mata uang, untuk mempertahankan posisinya, negara-negara kapitalis dengan berbagai cara mengambil penghasilan yang seharusnya dimiliki dan dinikmati oleh negara pinggiran. Sebaliknya berbagai langkah yang ditempuh oleh negara-negara *periphery* untuk menjadi pusat akan berhasil dengan jalan mampu mengurangi kenikmatan negara-negara yang saat ini berada di pusat.²⁹

Meskipun terdapat saling ketergantungan antara negara-negara pusat dengan negara-negara pinggiran di pihak lain, bukan berarti hubungan yang terbangun antar keduanya merupakan hubungan saling menguntungkan atau simbiose mutualistik. Hubungan mereka lebih seperti pemilik bank dengan nasabahnya. Pemilik bank memang

²⁸ F. A. Sutjipto, *Ibid.*, hlm. 89 – 122.

²⁹ Proses keterpinggiran negara-negara yang di kemudian hari dikenal sebagai Dunia Ketiga di Amerika Latin secara intensif diteliti dan melahirkan teori baru yang terkenal sebagai Teori Depedensi. Lihat Fernando Hendriquw Cardosa and Enzo Faletto, *Dependency and Development in Latin America*. Berkeley: University of California Press, 1979). Proses tersebut terjadi juga di negara-negara Dunia Ketiga lainnya.

membutuhkan nasabah untuk dapat mengembangkan uangnya. Akan tetapi, ketika terjadi kontrak peminjaman, pemilik bank lebih banyak mengatur atau memiliki kekuatan tawar. Sebaliknya, nasabah yang akan memanfaatkan uang posisi tawarnya sangat rendah dan untuk memperoleh pinjaman, satu-satunya jalan adalah hanya menuruti segala aturan yang ditetapkan pemilik bank.

Tidak jauh berbeda dengan lahirnya politik kolonial modern pada sejarah penjajahan Indonesia, proses globalisasi dewasa ini juga terutama didorong oleh kepentingan ekonomi kaum kapitalis.³⁰ Slogan-slogan seperti pasar bebas, anti proteksionisme, privatisasi perusahaan negara (BUMN), deregulasi dan debirokrasi yang mengiringi proses globalisasi secara jelas mengisyaratkan betapa besar kepentingan ekonomi kaum kapitalis global di dalamnya. Apabila proses tersebut mampu mengulangi keberhasilan politik kolonial modern Belanda di Indonesia, hasilnya dapat diperkirakan, yaitu semakin terpinggirkannya negara-negara miskin, karena dikuasainya kegiatan ekonomi mereka dari hulu sampai hilir oleh korporasi multinasional. Sedang di masing-masing negara miskin akan terjadi ketersingkirkan orang kecil oleh adanya koalisi dan konspirasi elite nasional dengan kekuatan ekonomi global.

Agar sejarah dalam fungsinya sebagai salah satu kekuatan arsitek dalam "*nation building*" tidak dipenuhi dengan penjelasan tentang proses peminggiran, penyingkiran, pemiskinan, pembodohan dan bahkan pengkulian rakyat Indonesia serta bukan menjadi pencetak generasi rendah diri, kiranya perlu dicari alternatif rekonstruksi terhadap berbagai peristiwa bernuansa global dewasa ini. Salah satu alternatif yang dapat dicoba adalah dengan menempatkan semangat resistensi bangsa Indonesia terhadap ketidakadilan yang terdapat pada proses strukturalisasi yang dilaksanakan negara-negara industri sebagai jiwa dari tulisan sejarah. Perspektif ini akan memberi ruang yang cukup luas untuk menempatkan berbagai penemuan dan hasil kreatif bangsa Indonesia dalam usaha menciptakan tata dunia baru yang lebih adil dan damai. Gerakan Non Blok, Poros Jakarta-Peking, pembentukan *New*

³⁰ Adanya hasrat untuk memaksimalkan profit dari kaum kapitalis sebagai motor paling kuat di belakang proses globalisasi antara lain diungkapkan pada Konperensi bertajuk *Colonialism to Globalization: Five Centuries After Vasco Da Gama* yang diselenggarakan oleh Indian Social Institute di New Delhi tanggal 1-6 Februari 1998. Lihat artikel Frans Magnis Suseno, "Kolonialisme dan Globalisasi" pada *Kompas*, 16 Maret 1998.

Emerging Force (NEFO), ASEAN, G-15 meskipun dalam berbagai kesempatan dipandang sebelah mata oleh negara-negara Industri dan tidak jarang disertai berbagai tekanan dan intimidasi, merupakan beberapa peran Indonesia yang sangat bernilai, terutama bagi negara-negara pinggiran, dalam rangka melawan ketidakadilan dalam strukturisasi dunia.

V. Penutup

Subyektivitas menjadi salah satu kekuatan penting yang mampu mendinamisasi penulisan sejarah. Kekuatan tersebut antara lain dapat dilihat dari dinamisnya perkembangan penulisan sejarah. Pada tingkat nasional, penulisan sejarah Indonesia modern telah mengalami perkembangan dari digunakannya perspektif kolonial, nasional dan lokal. Perubahan dan pengembangan perspektif yang tampak pada historiografi Indonesia modern tersebut merupakan berkah yang sangat bernilai dari diakui dan dihargainya subyektivitas dalam ilmu sejarah akademis.

Dewasa ini muncul trend baru dalam penulisan sejarah, yaitu penulisan sejarah dengan perspektif global atau lebih dikenal sebagai sejarah global. Kelahiran sejarah global itu sangat erat kaitannya dengan terjadinya proses globalisasi. Paling tidak ada lima dimensi yang mengindikasikan terjadinya proses globalisasi, yaitu semakin tingginya mobilitas penduduk antar bangsa, perkembangan teknologi, modal, media massa, dan penyebaran ideologi. Kelima aspek itu saling berkait dan berbaur secara kompleks dalam membangun sistem global. Mobilitas penduduk antar bangsa tidak akan terjadi dalam jumlah besar dan intensitas tinggi tanpa didukung oleh pesatnya perkembangan teknologi, baik di bidang transportasi maupun komunikasi; perpindahan/penyebaran modal ke hampir seluruh pelosok dunia; dukungan media massa serta motivasi ideologis.

Perlu dipahami bahwa globalisasi dimotori oleh kepentingan negara-negara industri yang ingin memaksimalkan keuntungan usaha mereka. Dari sudut pandang ini, globalisasi dapat dipahami sebagai bentuk lain dari penjajahan dan eksploitasi yang dahulu juga pernah dilakukan oleh bangsa Barat. Oleh karena itu, dalam usaha merekonstruksi proses terjadinya strukturisasi masyarakat ke arah terbentuknya sistem global, dewasa ini penelitian dan penulisan sejarah sudah seharusnya dilakukan secara hati-hati, agar tidak terjebak ke

dalam penghidupan kembali sejarah kolonial.

Dalam historiografi Indonesia modern pernah berkembang penulisan sejarah yang menggunakan perspektif kolonial. Hasilnya adalah tertenggelamkannya berbagai prestasi dan peran bangsa Indonesia serta ditonjolkannya peran kaum penjajah. Seakan-akan bangsa Indonesia merupakan bangsa terbelakang dan penuh kegelapan yang memperoleh pencerahan oleh kedatangan bangsa Belanda. Apabila perspektif kolonial digunakan lagi dapat diperkirakan bahwa hasilnya akan tidak jauh berbeda. Indonesia akan ditempatkan sebagai bangsa korup yang tidak demokratis, tidak menghargai hak asasi manusia serta miskin. Di lain pihak korporasi multinasional seperti IMF, World Bank, Toyota, Honda dan negara-negara industri akan ditempatkan sebagai pihak yang penuh kebaikan serta pembawa kemajuan bangsa Indonesia.

Apabila penelitian dan penulisan sejarah Indonesia menghidupkan kembali perspektif kolonial, akibatnya tulisan sejarah tidak akan mampu memberi "landasan, pedoman dan arah" yang memadai bagi bangsa Indonesia untuk menatap masa depannya. Bahkan sebaliknya, kemungkinan besar justru akan menghasilkan generasi yang malu terhadap bangsanya sendiri serta memandangnya sebagai masyarakat korup yang tidak demokratis, tidak menghargai hak asasi manusia serta miskin.

Salah satu langkah penelitian dan penulisan sejarah yang dapat dilakukan adalah dengan menempatkan resistensi terhadap ketidakadilan sebagai inti atau jiwa dari tulisan sejarah. Dengan demikian, sejarah global tidak hanya berisi ekspansi usaha korporasi multinasional dan perkembangan teknologi yang mendukungnya, tetapi juga diwarnai oleh usaha negara-negara miskin dan terbelakang untuk mempertahankan serta mengembangkan diri dalam pengertian kepribadian dan kepentingan mereka.

Daftar Pustaka

- Ankersmit, F. R. 1987. *Refleksi Tentang Sejarah*. Terjemahan Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia.
- Barnet, Richard J. and Ronald E. Muller. 1984. *Menjangkau Dunia: Menguk Kekuasaan Perusahaan Multinasional*. Terjemahan Setiawan Abadi. Jakarta: LP3ES.
- Bernas terbitan tanggal 1 September 2001
- Borton, Hugh, *Japan's Modern Century*. 1992. Second edition. New York: The Ronald Press Company.
- Cardosa, Fernando Hendrique, and Enzo Faletto. 1979. *Dependency and Development in Latin America*. Berkeley: University of California Press.
- Eko Agus Prawoto. *Memaknai Arsitektur Dalam Zaman Yang Berubah*. Makalah pada seminar Manusia dan Pengembangan IPTEK yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2001.
- F. A. Sutjipto. (ed). 1975. *Sejarah Nasional Indonesia IV: Indonesia dalam Abad 18 dan 19*. Jakarta: Depdikbud. hlm. 66 - 89.
- Featherstone, Mike. (editor). 1990. *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity*. London: Sage Publication.
- Hamilton, John Maxwell. 1990. *Entangling Alliance*. Washington: Seven Locks Press.
- Ishii, Ryosuke. 1988. *Sejarah Institusi Politik Jepang*. Jakarta: Gramedia.
- Kennedy, Paul. 1993. *Preparing for the Twenty First Century*. New York: Random House Inc.
- Kompas 12 September 2001.
- Kompas 3 Mei 2001
- Kompas tanggal 31 Mei 2001
- Kompas, 16 Maret 1998
- Naisbitt, John and Patricia Aburdene. 1990. *Megatrends 2000: Ten New Directions for the 1990's*. New York: William Morrow and Company Inc.